

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Refika Editama
- Effendi, S., & Singaribun, M. (1988). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Gramedia.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Hikmat, M. M. (2011). *Komunikasi Politik : Teori dan Praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nurmandi, A. (2006). *Manajemen Perkotaan*. Yogyakarta: Sinergi Publishing.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Sundar, S. (2005). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Syafiie, I. K. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Utrecht, E. (1994). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Wibowo, E., & dkk. (2004). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: YPAPI.

Zamroni. (1992). *Pengantar pengembangan teori sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

JURNAL & TESIS :

Alkatri, S. A. (2013). Efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Vol.1*, hal.6

Andiani, N. D. (2012). Konflik Pelanggaran Izin HO Pengusaha Bar Di Sentral Kawasan Wisata Lovina. *Jurnal Media Komunikasi Vol.11*, hal.1.

Arief, L. (2008). Implementasi Kebijakan Perda No. 7 Tahun 1992 Tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu-ilmu sosial Vol 8 No 2*, hal.84.

Atmaja, A. Y. (2010). *Tesis : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Gangguan Di Kota Surakarta* . Surakarta: pustaka UNS.

Claudia, E. M. (2016). Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta

Erviantono, T. (2015). Tipologi Tata Kelola Penegakan Sanksi Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Tabanan dalam Perspektif Governance. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali*, hal.1.

Jalaluddin. (2011). Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik. *Aktualita Vol.6*, hal.3.

Kurniawan, R., R. I., & Dahana, C. D. (2013). Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan. *Kertha Desa Vol.1*, hal.01.

Purnomo, H. (2015). *Tesis: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan (Studi Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau Tahun 2014)*. Jakarta: Doctoral dissertation Universitas Terbuka.

Suyoto. (2008). Penegakkan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No.3*, hal.2.

WEBSITE & BERITA :

Ferri, R. (2015, Desember 29). *Dintib Kota Yogya Jaring 1.146 Pelanggar Perda Sepanjang 2015*. Dipetik Januari 28, 2017, dari Tribun Jogja: <http://jogja.tribunnews.com>

Mahrizal, V. (2015, September 1). *Tipiring Usaha Hotel Didominasi Pelanggaran HO*. Dipetik Januari 28, 2017, dari Tribun Jogja: <http://jogja.tribunnews.com>

Rusqiati, E. A. (2017, Januari 18). Ditemukan minimarket berjejang pasang izin gangguan kedaluwarsa. Dipetik Januari 27, 2017, dari Antarayogya: <http://www.antarayogya.com>